



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 231/12122008
HARI : JUMAT
TANGGAL : 12 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Southeast Asian informant taken off UN terror list	3
	Pertumbuhan Asia 2009 Melambat	3
	Peringatan 50 Tahun Indonesia-Jepang	3
	Koran Thailand: Ali Atlas Negarawan Besar Asia	4
	Senin Depan Parlemen Thailand Pilih PM Baru	5
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Indonesia Kehilangan Diplomat Terbaiknya	5
	B. EKONOMI	
	Pemerintah Diminta Hati-Hati Nego Utang	7
	Kegagalan "Bailout" Otomotif AS Tak Signifikan Pengaruhi Indonesia	8
	Ekspor Tekstil 2008 Diprediksi Naik	8
	C. SOSBUD	--
	D. HANKAM	
	RI-Malaysia Sepakati Aturan Pelibatan Daerah Sengketa	9

		Ambalat Tidak Dibahas, TNI AU Gelar Operasi Pengamanan di Ambalat	9
	E.	HUKUM	--
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Perubahan Iklim di Indonesia Bertahan pada Ketergantungan	10
III.	ARTIKEL		
		Ali Atlas Lebur dalam Sejarah ASEAN (Oleh Gusti NC Aryani)	12
		War on drugs in RI: Demonizing the most vulnerable (by Martin Lundqvist and Ricky Gunawan)	14
IV.	LAIN-LAIN		--
V.	EDITORIAL		
		Bukan Soal Menang Kalah	15
		A statesman extraordinaire	16

Jakarta, 12Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Southeast Asian informant taken off UN terror list

Nasir Abbas, a key leader of the Southeast Asian militant group Jemaah Islamiyah before becoming a police informant, welcomed news Friday he had been taken off a U.N. terror list.

No reason was given for the decision, but Abbas said it was in recognition of his efforts to convince jailed Islamic militants - many of whom he helped train in Afghanistan and the southern Philippines - that killing civilians could never be justified.

"I'm very grateful," said Abbas, 39, who has been called a traitor by former friends. "I've proven that I am not a terrorist."

Indonesia, the world's most populous Muslim nation, has been hit by a string of suicide bombings blamed on Jemaah Islamiyah since Sept. 11, 2001, that together have killed more than 240 people, many of them foreign tourists.

Abbas, a Malaysian national, headed Jemaah Islamiyah's military training division before his arrest in Indonesia in 2003 on immigration charges. The United Nations placed him on its list of suspected terrorists five years ago and removed him Sept. 26.

2. Pertumbuhan Asia 2009 Melambat

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memproyeksikan perekonomian kawasan Asia pada 2009 akan melambat dan hanya tumbuh 5,8%.

Angka tersebut jatuh dari angka pertumbuhan tahun ini sebesar 6,9% dan 9% pada 2007. Kondisi ini akibat dampak krisis ekonomi global yang membuat permintaan pasar dunia melemah. Dalam laporan tahunan Asia Economic Monitor (AEM) yang dirilis ADB kemarin, disebutkan bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia akibat melemahnya pasar ekspor dan melemahnya likuiditas.

"Tahun 2009 sepertinya akan lebih sulit bagi negara berkembang di Asia sehingga diperlukan manajemen yang mumpuni untuk merespons krisis secara kolektif antarnegara," ujar Jong-Wha Lee, kepala ADB untuk kawasan Regional Economic Integration (OREI).

Kendati dalam kesuraman, kata Lee, Asia dinilai relatif berada dalam posisi lebih baik untuk menghindari dampak buruk dari krisis tersebut, selama kawasan itu waspada terhadap penurunan apa pun. "Aksi cepat dari pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk mengurangi ancaman krisis.

Untuk itu, diperlukan langkah nyata untuk menjaga pertumbuhan, jangan sampai berlanjut menjadi lebih buruk," kata Lee. Lee menambahkan, salah satu langkah penting dalam menghadapi perlambatan ekonomi adalah dengan memberikan stimulus untuk menambah belanja konsumen domestik.

"Pemerintah bisa membangun infrastruktur dan konstruksi untuk membangkitkan investasi," tuturnya. ADB juga merekomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk bergerak cepat dalam menyalurkan kredit ke pasar dan menyediakan likuiditas regional untuk merangsang ekspor.

Dalam laporan tersebut, ADB juga menyatakan pertumbuhan negara-negara di kawasan Asia Timur yang meliputi China, Hong Kong, Korea Selatan, diperkirakan hanya akan tumbuh 5,7% pada tahun depan, turun dari 6,9% pada tahun ini. Khusus China, yang telah menjadi kekuatan baru ekonomi dunia, diperkirakan akan tumbuh 8,2% pada tahun depan, turun dari tahun ini yang mencapai 9,5%.

Sementara itu, Pemerintah China melalui Biro Statistik Nasional kemarin mengumumkan angka inflasi November turun sebesar 2,4% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4%. Data tersebut, menurut para analis, memunculkan kekhawatiran baru dalam hal konsumsi dalam negeri China yang bisa menyebabkan deflasi.

"Krisis keuangan global berlanjut ke wilayah lain. Ini tekanan buat kita (China) karena deflasi semakin dekat," ujar ekonom dari Moody's Economy. com, Sherman Chan. (Koran Sindo)

3. Peringatan 50 Tahun Indonesia-Jepang

Serangkaian panjang kegiatan peringatan 50 tahun persahabatan Indonesia-Jepang berakhir di Tokyo, Kamis (11/12) , yang ditandai dengan sebuah pameran teknologi dan resepsi yang dihadiri tokoh-tokoh kedua negara. Indonesia mengirim misi kesenian untuk acara tersebut.

Puncak peringatan tahun emas persahabatan kedua bangsa yang digelar surat kabar ekonomi Nikkei itu dihadiri Pangeran Akishino dan mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda. Dari pihak Indonesia hadir, antara lain, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang Ginandjar Kartasasmita dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Jusuf Anwar.

Rangkaian kegiatan peringatan tahun emas persahabatan Indonesia-Jepang dimulai Januari 2008 di Taman Mini Indonesia Indah saat diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga dihadiri Pangeran Akishino. Adapun puncak kemeriannya di Indonesia ditandai dengan pameran Indonesia-Jepang yang digelar harian Kompas dan Nikkei pada 1-9 November di Jakarta.

Selama setahun berlangsung sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di kedua negara, baik di ibu kota negara masing-masing maupun kota lain.

Kepada Kompas, Ginandjar Kartasasmita menyatakan kunjungannya ke Jepang kali ini, selain menghadiri puncak peringatan tahun emas persahabatan Indonesia-Jepang, juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat. Di antaranya, PM Taro Aso, Menteri Luar Negeri Hirofumi Nakasone, dan Menteri Keuangan Shoichi Nakagawa serta sejumlah politisi serta akademisi.

"Kami membahas berbagai masalah yang berkenaan dengan krisis ekonomi global yang kini sudah mulai terasa dampaknya di seluruh dunia," kata Ginandjar.

Sebagaimana disepakati dalam pertemuan G-20 di Washington, AS, dan APEC di Peru, dampak krisis sangat luas dan dalam. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan tepat dan cerdas dari setiap negara, juga perlu kerja sama internasional.

"Para pejabat Jepang yang saya temui menyatakan siap membantu Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi. Dengan rekan para akademisi dan berbagai latar belakang dan perguruan tinggi serta lembaga-lembaga riset, kami bicarakan berbagai konsep dan pemikiran tentang krisis ini, cara mengatasinya, dan mencegah terjadi lagi di masa mendatang," kata Ginandjar.(Kompas)

4. Koran Thailand: Ali Atlas Negarawan Besar Asia

Salah satu surat kabar utama Thailand, The Nation, memuji mantan Menteri Luar Negeri Ali Atlas, sebagai negarawan besar Asia terutama karena inisiatif-inisiatif diplomatiknya yang brilian di Kamboja dan perjuangannya memoles citra Indonesia ketika Insiden Santa Cruz di Timor Timur mencoreng pencapaian diplomasi RI yang fenomenal saat itu.

"Di kawasan (Asia Tenggara) sendiri, sosok menjulang dalam diplomasi Asia ini, sebagaimana disebut Sekretaris Jenderal ASEAN Dr Surin Pitsuwan, dikenal memegang kunci terpenting dalam konflik Kamboja yang meretas negosiasi damai di Paris pada 1991," tulis editor The Nation, Kavi Chongkittavorn.

Dalam tulisan obituarinya pada The Nation (12/12) Kavi mengisahkan, pada Juli 1988 di Istana Bogor dalam Jakarta Informal Meeting, Bapak, demikian Kavi menyebut Ali Atlas, berhasil meyakinkan pihak-pihak bertikai di Kamboja yang terdiri dari rezim Heng Samrin dukungan Vietnam, kelompok loyalis Raja dan Khmer Merah duduk semeja untuk menyelesaikan masalah mereka.

"Saya ingat kata-katanya pada saya dalam satu seminar di Beijing April tahun ini, 'Saya tidak bisa berbuat apa-apa, jika mereka (pihak-pihak bertikai) tidak menginginkan perdamaian. Merekalah yang pertamakali mesti menginginkan damai, setelah itu baru kita membantu dan membangun kepercayaan diri mereka," kenang Kavi.

Atas jasa-jasanya mendamaikan pihak-pihak bertikai di Kamboja inilah, pemerintahan Kerajaan Thailand melalui Perdana Menteri Chuan Leekpai menganugerahkan medali kehormatan tertinggi negara itu kepada Ali Alatas.

The Nation lalu menyebut Ali Alatas sebagai wajah dan suara Indonesia di dunia internasional pada 1980an dan 1990an, bahkan menjadi orang terdepan yang menjelaskan pada dunia tentang Indonesia termasuk saat disorot internasional karena berbagai manuver politik dalam negeri yang acap mencoreng keberhasilan diplomasi Indonesia.

Koran Thailand ini lalu menyebut insiden Santa Cruz, Timor Timur, pada 1991, yang menurut pengakuan Ali Alatas kepada Kavi Chongkittavorn telah menjadi titik balik keberhasilan diplomasi Indonesia saat itu.

"Dia kemudian menulis sebuah buku mengenai perjuangan diplomasi negaranya perihal Timor Timur, yang digambarkannya bagai kerikil dalam sepatu Indonesia," tulis Kavi.

Seperti halnya media massa ASEAN diantaranya Malaysia dan Singapura, The Nation juga memuji reputasi internasional Ali Alatas selama memimpin korps diplomatik Indonesia, bahkan saat dia pensiun dan menjadi utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Koran ini mengisahkan pencapaian diplomasi terakhir Ali Alatas dalam soal Myanmar, yang disebut sebagai arsitek kunci penyelesaian menyeluruh negeri yang masih kerap disebut Burma ini. Ali Alatas ingin mempraktikkan keberhasilan Kamboja di Myanmar.

"Para pemain kunci (dalam solusi di Myanmar) seperti China, India dan Vietnam telah menunjukkan dukungannya pada rencana Indonesia (yang digagas Ali) itu, tapi sayang Presiden Yudhyoyono tidak mengeluarkan pernyataan resminya. Dia (Ali Alatas) berulang kali meminta junta Myanmar untuk membebaskan pemimpin oposisi Aung Saan Suu Kyi," tulis Kavi.

The Nation juga mengungkapkan hubungan istimewa Ali Alatas dengan para wartawan yang disebut Harian itu sebagai sosok yang selalu terbuka pada pers dan mau meladeni hal apapun yang ditanyakan wartawan, termasuk saat-saat paling sulit sekalipun.

"Saya beruntung bertemu (beberapa kali) dengan Bapak (Ali Alatas) dalam banyak konferensi pers, diantaranya mengenai ASEAN dan Timor Timur, baik di dalam negerinya sendiri (Indonesia) maupun di luar," kata Kavi. (ANTARA)

5. Senin Depan Parlemen Thailand Pilih PM Baru

Parlemen Thailand akan memilih perdana menteri baru pada 15 Desember, kata seorang pejabat Partai Demokrat, Kamis, sementara kedua partai utama dalam pemerintah sekarang dan Demokrat, oposisi utama sama-sama mengaku akan menang pemilihan tersebut.

"Raja menyetujui permintaan itu dan ketua parlemen menetapkan tanggal pemilihan perdana menteri baru pada 15 September pukul 09:30 waktu setempat (09:30 WIB)," kata Sekjen Demokrat Suthep Thaugsuban kepada *Reuters*.

Pemungutan suara diperlukan karena Somchai Wongsawat terpaksa mundur sebagai perdana menteri pekan lalu ketika partainya dan dua partai lainnya di koalisi yang memerintah dilarang oleh pengadilan karena terlibat kecurangan dalam pemilu setahun lalu.

Somchai dan beberapa menteri dilarang melakukan kegiatan politik selama lima tahun tetapi para anggota parlemen lainnya pindah ke partai-partai baru .

Partai Demokrat mendapat dukungan cukup dari empat partai kecil bekas mitra dalam koalisi enam partai terdahulu untuk menjamin bahwa pemimpinnya, Abhisit Vejjajiva, menjadi perdana menteri, kata Suthep.

Demokrat dan sekutu-sekutu baru mereka mengklaim memiliki 260 suara dalam parlemen yang memiliki 480 kursi.

Puea Thai, nama baru untuk partai terbesar di koalisi lama, mengatakan mereka masih memiliki cukup dukungan untuk membentuk satu koalisi, walaupun sejumlah anggotanya sendiri membelot.

Puea Thai adalah inkarnasi terbaru dari satu partai sekutu-sekutu Thaksin Shinawtra, yang digulingkan sebagai perdana menteri dalam kudeta September 2006 dan kini tinggal di pengasingan. (Media Indonesia)

NASIONAL

A. POLITIK :

1. Indonesia Kehilangan Diplomat Terbaiknya

Indonesia kehilangan salah satu orang terbaiknya, diplomat ulung Ali Alatas. Mantan Menlu yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu berpulang kemarin pukul 07.30 waktu Singapura setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura sejak 25 November karena sakit jantung.

Mendiang Ali Alatas yang mengabdikan diri di Deplu sejak tahun 1954 meninggalkan seorang istri, tiga orang anak dan lima cucu. Menurut salah seorang menantunya, Witjaksana Soegarda, mendiang masuk RS Medistra, Jakarta pada 15 November 2008 karena terdapat air pada paru-parunya. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di rumah sakit tersebut, dokter yang menangani memutuskan untuk merujuknya ke RS Mount Elizabeth Singapura.

Mendiang ke Singapura diantar keluarga, di antaranya istrinya Yunisa, putri pertama Soraya Alatas, putri kedua Nadira Alatas, dan putri ketiganya Fauziah Alatas. Witjaksana menambahkan, setelah menjalani perawatan di Singapura tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa bapak mertuanya itu mendapat serangan jantung hingga akhirnya meninggal. Jenazah mendiang Ali Alatas tiba di Tanah Air sekitar pukul 18.10 WIB kemarin dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Penyambutan dilakukan di Ruang Khusus Very Important Person (VIP), Terminal 1-B Bandara dihadiri sejumlah pejabat termasuk Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda Sekitar pukul pada pukul 19.55, jenazah tiba di rumah duka di Jalan Benda Raya Nomor 19, Cilandak, Jakarta Selatan. Jenazah diserahkan dari Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Wardana kepada Menko Polhukam, Widodo AS, secara militer.

Ikut melayat ke rumah mendiang adalah Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi yang menyampaikan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga. "Saya taksiah kepada istri dan anak almarhum," ujarnya. Badawi mengatakan bahwa Ali Alatas mempunyai peranan yang sangat besar untuk mempererat kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Ali Alatas merupakan diplomat, tokoh pendidik dan negarawan yang sangat dicintai dan dihormati serta disegani baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Beliau diplomat tangguh, tekun, kerja keras dan tidak mengenal lelah. Dalam diplomasi beliau tahan berminggu-minggu untuk tetap berada di meja perundingan demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Presiden SBY dengan nada terputusputus dalam keterangan persnya, sesuai melayat di rumah duka.

Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di kediaman Ali Alatas, sesaat setelah mantan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi selesai melayat. Kedatangan Presiden dan Ibu Negara disambut langsung oleh istri dan keluarga Ali Alatas, yang saat itu masih menampakkan duka yang dalam. "Sebagai anggota Wantimpres, beliau dengan tekun dan sabar menyampaikan pandangan-pandangannya yang positif kepada Presiden.

Beliau juga menyampaikan pandangan kritis dengan cara yang tepat, dan juga memberi masukan yang baik sebagai anggota Wantimpres," tandas Presiden. Wapres Jusuf Kalla tiba melayat di rumah duka sekitar pukul 21.25 WIB. Tampak juga beberapa pejabat dan mantan pejabat, di antaranya mantan Presiden BJ Habibie, anggota Wantimpres Emil Salim, Kepala BIN Syamsir Siregar, Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Tentang Ali Alatas, Wapres Jusuf Kalla menyebut mendiang sebagai 'the real diplomat' yang memiliki kemampuan.

"Kita semua berbelasungkawa atas berpulangnya tokoh diplomat kita. Kita berharap bisa meniru atau meneladani Beliau," ungkap Kalla. Menurut Kalla, Ali mampu menjaga setiap perundingan dalam suhu normal. Tidak ada ketegangan antara dua belah pihak yang berunding. "Suasana tetap pada suhu yang sopan. Saya mengikuti beberapa pembicaraan dan beliau sangat tidak pernah membuat suatu ketegangan," paparnya. Kalla mengatakan, dua hal yang paling penting yang harus dimiliki seorang diplomat adalah networking dan pengetahuan yang luas.

Ali Alatas merupakan salah seorang diplomat yang memiliki semua itu. "Dia punya pengetahuan sangat luwes, tetapi punya prinsip tentang bagaimana mendahulukan kepentingan nasional," tandasnya. Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, kepergian Ali Alatas meninggalkan duka mendalam di lingkungan Departemen Luar Negeri. "Kita kehilangan orang besar bagi negara ini," kata Menlu.

Dia menilai, Ali Alatas merupakan tokoh yang mendedikasikan hidupnya tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga untuk dunia. Profesinya sebagai diplomat senior menempatkan

almarhum sebagai juru bicara negara berkembang dalam membangun era baru dunia. Sebagai senior diplomat di PBB, Ali Alatas berjasa besar bagi tercapainya kemerdekaan di Kamboja. Almarhum juga pernah memimpin pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dengan separatis Moro atau MNLF di tahun 1996.

Kemudian antara 1993-1999, dia memegang peran kunci dalam pembicaraan dalam persoalan Timor Timur. "Dia bukan saja atasan, tapi juga mentor saya. Saya banyak belajar dari beliau hingga karier saya bisa seperti saat ini," ungkap Wirajuda. Sementara itu Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, Presiden SBY sangat terkejut ketika mendengar kepergian Ali Alatas. Saat Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono membesuk Ali Alatas pada hari Minggu (7/12) lalu, kondisinya sudah mulai membaik.

"Pak Ali nampak sedang recovery dan bahkan sudah ada rencana mau pulang tanggal 17 Desember ini. Jadi waktu itu kesan Presiden adalah beliau sudah membaik kondisinya," ujar Dino di kantor Kepresidenan Jakarta. Dino mengatakan, jenazah Ali Alatas pagi ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer dengan Inspektur Upacara Presiden SBY. Selama mengabdikan kepada bangsa dan negara, Ali Alatas pernah mendapatkan bintang Adi Mahaprana dan bintang Republik Indonesia Utama. (Koran Sindo)

B. EKONOMI

1. Pemerintah Diminta Hati-Hati Nego Utang

Pemerintah diminta berhati-hati dalam menegosiasikan pinjaman luar negerinya dengan berbagai negara dan lembaga donor internasional.

Hal itu untuk mengurangi terciptanya potensi prasyarat atau kewajiban yang lebih berat. Ketua Koalisi Antiutang Dani Setiawan mengatakan, lazimnya pemberian pinjaman utang kerap dibarengi pemberian prasyarat, yang bahkan sering kali malah memberatkan. "Utang yang diberikan tidak semuanya berupa uang, tapi beragam, bisa barang dan jasa, juga seperti tenaga konsultan proyek.

Itu yang harus dihindari," ujar Dani dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin. Menurut Dani, dari struktur utang luar negeri Indonesia, 70–80% merupakan utang proyek. Selain memiliki tingkat bunga yang lebih besar, prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah juga tidak jarang sangat memberatkan dibanding utang program luar negeri.

Kewaspadaan terhadap pinjaman utang luar negeri juga harus dilakukan, karena negara-negara dan lembaga donor saat ini dilanda kesulitan akibat krisis finansial yang berdampak pada struktur perekonomian masing-masing. Pemberian utang yang dilakukan melalui barang dan jasa hanya akan mentransfer beban krisis yang dialami negara dan lembaga donor tersebut.

"Semakin besar kredit yang mereka berikan, semakin besar beban yang harus kita tanggung. Sebaliknya, semakin besar kredit yang diberikan, semakin cepat mereka memulihkan diri dari dampak yang dihadapi," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akhir-akhir ini gencar mencari pinjaman dana siaga (standby loan) yang direncanakan senilai USD5 miliar. Rencananya, dana itu digunakan pemerintah dalam menstimulus perekonomian domestik ketika pertumbuhan ekonomi hanya bergerak di level pesimistis 5–5,8%.

Dari yang direncanakan, USD2 miliar sudah didapatkan dari komitmen Bank Dunia. Sisanya sebesar USD3 miliar diharapkan dari berbagai lembaga multilateral lain, seperti Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Islam. Sementara dari sumber bilateral diharapkan berasal dari negara-negara donor yang masih memiliki likuiditas cukup, seperti Australia.

Pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menegosiasikan penarikan pinjaman sebesar USD12 miliar dari kelompok bank-bank sentral ASEAN dan tiga Bank Sentral lain, yakni People Bank of China, Bank of Korea, dan Bank of Japan (ASEAN+3). Pinjaman ini rencananya digunakan menambal cadangan devisa nasional yang terus tergerus hingga posisi terakhir USD50,2 miliar.

Isi negosiasi di antaranya keinginan Indonesia tidak dikenai prasyarat pengawasan Dana Moneter Internasional (IMF). Sesuai aturannya, ASEAN+3 mempersyaratkan negara yang meminjam lebih dari 20% dari total dana dimilikinya USD80 miliar harus menerima pengawasan IMF.

Di lain pihak, menurut Ketua Forum Stabilitas Sektor Keuangan Raden Pardede, IMF pernah menawarkan pinjaman untuk menambal cadangan devisa dalam negeri hingga USD15 miliar. Kendati tidak dikenai prasyarat apa pun, pemerintah mengklaim belum berkeinginan mempergunakan fasilitas pendanaan IMF. (Koran Sindo)

2. Kegagalan "Bailout" Otomotif AS Tak Signifikan Pengaruhi Indonesia

Pengamat Ekonomi Fauzi Ikhsan mengatakan, kegagalan senat AS mencapai kesepakatan mengenai "bailout" atau penyalangan bernilai multi miliaran dolar AS untuk industri otomotif tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Indonesia.

"Secara umum, pengaruhnya pada pasar saham. Kegagalan kesepakatan itu kan akan membuat pasar saham AS merosot, dan biasanya akan diikuti oleh pasar saham di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun pengaruhnya untuk perekonomian secara keseluruhan tak signifikan termasuk untuk rupiah," katanya.

Ia menambahkan, saat ini pelemahan rupiah karena kondisi yang tidak normal dari akibat krisis keuangan yang melanda dunia. "Jadi lebih pada kekeringan likuiditas akibat krisis," katanya.

Ia mengatakan, penguatan rupiah akhir-akhir ini memperlihatkan rupiah sudah mulai memperbaiki posisi keseimbangannya. "Bila ini berlanjut, maka rupiah dapat kembali turun menuju Rp10.000 per dolar AS," katanya. Ia mengatakan optimis perbaikan rupiah dalam semester dua tahun depan.

Terkait kegagalan bailout Fauzi menduga pada awal tahun depan, pemerintah AS akan menawarkan program bailout baru untuk stimulasi perekonomian AS.

"Kita akan lihat nanti sekitar 20 Januari, ketika pemerintahan AS sudah berubah, serta komposisi senat yang juga akan berubah," katanya.

Ia meyakini dalam pemerintahan baru nanti, akan ada kompromi-kompromi kebijakan terkait dengan program bailout tersebut. (ANTARA)

3. Ekspor Tekstil 2008 Diprediksi Naik

NILAI ekspor industri garmen Indonesia diprediksi mencapai US\$10,81 miliar tahun 2008 atau mengalami pertumbuhan sekitar delapan persen. Meski angka ini tidak sesuai target pertumbuhan 10 persen, namun lebih tinggi dibanding tahun 2007.

Direktur Eksekutif Indotextiles Redma Gita Wirawasta mengatakan, produk TPT yang biasa diekspor antara lain serat 33,6 persen, benang dan kain 0,6 persen, pakaian jadi 11,4 persen. "Selain nilai ekspor yang meningkat cukup signifikan, penjualan domestik garmen juga naik 5,4 persen hingga total penjualan naik menjadi 6,9 persen," katanya di Jakarta, Rabu (10/12).

Di sisi lain, nilai impor dibandingkan tahun 2007 juga naik 20,5 persen dengan US\$5,19 miliar. Produk impor itu antara lain, serat 21,5 persen, benang dan kain 19,4 persen, dan pakaian jadi 28,9 persen.

Redma mengatakan, akibat krisis global kinerja bisnis TPT dalam negeri tidak berpengaruh signifikan. Sebab, volume konsumsi di pasar domestik meningkat dengan konsumsi per kapita mencapai 5,2 kg, tahun 2007 mencapai 5,3 kg per kapita.

Total konsumsi pakaian jadi dan barang jadi tekstil di pasar domestik 2008 US\$298,2 miliar. Konsumsi pakaian jadi 2,4 persen dengan nilai US\$7,18 miliar. Konversi volume US\$ 5,8 per kg sebanyak 1.238 ribu ton.

"Meski resesi saat ini pasar termasuk bagus. Hanya permasalahan resesi ada di daya beli. Daya beli dapat diatasi jika ada lapangan pekerjaan baru," ujar dia.

Untuk kenaikan penjualan di pasar domestik, ujar dia, terdorong pertumbuhan penduduk. Karena konsumsi per kapita turun akibat turunya daya beli masyarakat atau inflasi yang tinggi. "Penjualan di pasar domestik memang ada sedikit penurunan. Adapun kenaikan karena setelah dipicu Lebaran dan pengetatan pemeriksaan di pelabuhan terhadap barang impor ilegal."

Meskipun masih menjadi ancaman, produk impor khususnya pakaian jadi dari China sudah mulai kehilangan daya saing. Belum lagi ditambah kebijakan pemerintah melindungi pasar domestik.

"Dengan resesi dunia ini membuat lingkungan ekonomi bisnis mendorong produk TPT Indonesia melakukan penetrasi lebih besar di pasar Uni Eropa, ASEAN, dan pasar nontradisional khususnya Timur Tengah." (Jurnal Nasional)

C. **SOSBUD** : **Tidak Ada**

D. **HANKAM** :

1. **RI-Malaysia Sepakati Aturan Pelibatan Daerah Sengketa**

PEMERINTAH RI dan Malaysia sepakat membahas prosedur tetap aturan pelibatan di wilayah perairan yang masih menjadi sengketa. Salah satunya, sengketa Ambalat yang belakangan memanas kembali. Menurut Menteri Juwono Sudarsono, saat ini aturan sedang dituntaskan matra laut kedua negara.

"Aturan ini akan menjadi pegangan dan pedoman awak kapal yang bertugas di daerah sengketa," katanya dalam konferensi pers hasil Sidang *General Border Committee* (GBC) Malaysia-Indonesia ke 37 di Jakarta, Kamis (11/12).

Juwono memimpin delegasi Indonesia, sedangkan Malaysia dipimpin Abdullah Ahmad Badawi, Menteri Pertahanan yang merangkap Perdana Menteri Malaysia.

Menhan mengatakan, sengketa Ambalat tidak secara khusus dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Permasalahan penentuan batas wilayah yang bersifat politis diserahkan pada departemen luar negeri melalui meja perundingan. Menurutnya, forum ini hanya membahas pelaksanaan yang bersifat operasional dan teknis untuk melaksanakan kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi antaraparat keamanan di kawasan perbatasan.

Hal senada diungkapkan Badawi. Saat ini, diplomat kedua negara terus melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa Ambalat.

"Kita tunggu saja prosesnya," kata Badawi.

Dia lebih menyoroti masih terjadinya penyelundupan dan perompakan di sepanjang perbatasan kedua negara. Menurut dia, kedua negara tidak boleh puas dengan segala yang sudah dicapai, karena berbagai kejahatan akan terus terjadi di wilayah perbatasan.

"Kejahatan itu mengganggu pembangunan sosial ekonomi serta keharmonisan penduduk perbatasan," katanya.

Badawi tidak memungkirkan krisis ekonomi global yang berujung pada melemahnya daya beli masyarakat perbatasan akan memicu aksi kejahatan seperti penyelundupan. Untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan ilegal perbatasan, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama intelijen.

Menurut Badawi, selain rasa aman, keberhasilan penanganan, dan pengelolaan perbatasan sangat tergantung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Sepanjang terjamin kesejahteraannya kegiatan ilegal akan dapat ditekan," katanya.

Juwono mengakui, permasalahan di perbatasan semakin kompleks dan dinamis. Jenis kejahatan transnasional seperti penyelundupan, terorisme, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, dan perdagangan manusia juga makin berkembang.

Dia berharap forum ini dan badan-badan di bawahnya perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di perbatasan. Alasannya, guna meningkatkan kinerja serta merumuskan bentuk kerja sama baru dalam mengatasi berbagai persoalan perbatasan.

Forum GBC telah dimulai sejak 1972 telah banyak mengalami kemajuan yang dicapai kedua negara. Sidang berikutnya yang ke 38 akan dilaksanakan di Malaysia. (Jurnal Nasional)

2. **Ambalat Tidak Dibahas, TNI AU Gelar Operasi Pengamanan di Ambalat**

Pertemuan rutin tahunan yang membahas berbagai persoalan seputar masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, *General Border Committee*, sama sekali tidak menyinggung sengketa yang terjadi di kawasan Blok Ambalat. Padahal, kasus Ambalat tetap menjadi "ganjalan" kedua negara.

Kedua pimpinan delegasi *General Border Committee* Indonesia-Malaysia, yaitu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan pejabat Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Kamis (11/12), menyatakan bahwa persoalan Ambalat tidak dibicarakan.

Seperti diwartakan, kawasan itu kerap menjadi sorotan menyusul terjadi sejumlah persinggungan antararmada kapal perang angkatan bersenjata kedua negara. Blok Ambalat yang diyakini memiliki kandungan minyak dan gas bumi itu disebut-sebut juga menjadi rebutan dua perusahaan minyak internasional.

"Persoalan Ambalat tidak dibicarakan dalam sidang General Border Committee ke-37 ini karena kami sepakat menyerahkan soal itu ke proses perundingan, yang selama ini telah berjalan dan dilakukan antardepartemen luar negeri masing-masing," ujar Juwono.

Menurut Juwono, walaupun ada pembahasan, yang bisa disebut terkait masalah sengketa di Ambalat hanya sebatas penetapan aturan pelibatan (rules of engagement) antarkedua belah pihak, misalnya jika terjadi penahanan terhadap awak kapal salah satu pihak oleh pihak lain.

Dalam jumpa pers itu Abdullah Ahmad Badawi menyatakan setuju persoalan Ambalat diserahkan penyelesaiannya di tingkat perundingan dengan mengedepankan upaya saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kerahkan kekuatan

Menyusul sejumlah insiden "persinggungan", TNI Angkatan Udara dalam siaran persnya menyatakan mengerahkan sejumlah pesawat tempurnya. Disebutkan, satu flight pesawat jet tempur jenis F-16, dengan sembilan pilot, asal Skuadron Udara 3 Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi, Madiun, digerakkan dan ditempatkan di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar.

Selama seminggu, pesawat-pesawat dan para pilot tempur itu secara khusus akan menggelar operasi pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia di wilayah perairan Ambalat.

Pangkalan Udara TNI AU Hasanuddin juga menjadi markas Skuadron Udara 11, yang selama ini diperkuat dengan jet tempur Sukhoi jenis Su-27 dan Su-30.(Kompas)

- E. HUKUM : Tidak Ada**
- F. OLAH RAGA : Tidak Ada**
- G. LINGKUNGAN HIDUP :**

1. Perubahan Iklim di Indonesia Bertahan pada Ketergantungan

Ada perasaan lega seusai berlangsung konferensi perubahan iklim pada akhir tahun 2007 lalu di Bali. Selain lahirnya keputusan Bali Action Plan yang mengisyaratkan tetap tingginya hasrat negara-negara dunia untuk mencermati masalah tersebut, ada beberapa tindakan secara internal publik Indonesia yang mengemuka. Salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim (RANPI).

Dalam program yang disarikan dalam sebuah buku tersebut, RANPI terlihat ideal sebagai rencana persiapan Indonesia menghadapi isu lingkungan saat ini, mulai dari tahap persiapan hingga upaya-upayanya. Waktu itu, dalam hati saya tidak terbersit kepercayaan kalau orang-orang di negeri kita ini tidak seburuk seperti yang diduga. Dan paling tidak hingga 2025 nanti, ketika program dalam buku tersebut dinyatakan usai, semua dampak dari perubahan iklim bisa dihindari dengan baik.

Dua bulan setelah RANPI dimaklumkan, saya kembali menanyakan bagaimana kemajuannya. Masnellyarti Hilman, Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup memaparkan bahwa program awal RANPI masih dijalankan, yaitu inventarisasi semua kemungkinan dampak dan penyebab dari perubahan iklim di Indonesia.

Saat bulan ketiga kembali ditanyakan tentang sejauh mana Program RANPI dijalankan--karena tak pernah ada pemberitahuan apa pun kepada masyarakat mengenai hal ini--tak ada pemberitahuan soal sejauh mana kegiatan inventarisasi telah dilakukan. Jawabannya kembali hanya berupa penjelasan bahwa inventarisasi terus berjalan--tanpa ada satu bukti pun tentang inventarisasi yang dimaksud.

Bulan Juni 2008 Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar terbang ke Bonn, Jerman, setelah sebelumnya pada Maret pergi juga ke Accra, India. Kewajiban Rachmat sebagai Presiden COP/MOP UNFCCC XIII, mengharuskannya terbang ke kedua tempat tersebut.

Pada 17 Juni 2008, sebelum menghadiri pertemuan di Bonn, Rachmat berkesempatan melakukan diskusi media di kantornya. Berbagai pertanyaan mengenai kemajuan program perubahan iklim kontan bertebaran. Salah satu yang paling ditekankan Rachmat waktu itu adalah masalah tak berkomitmennya negara maju dalam memberikan pendanaan untuk dampak perubahan iklim. Tapi menurutnya, negara maju tidak mundur dari komitmen, hanya terlihat sungkan. "Janji sekian, tapi keluar pendanaan sulit," ujar Rachmat waktu itu. "Ditakutkan akan terjadi deadlock (jalan buntu-red) mengenai masalah pendanaan di Bonn," tambahnya.

Pembentukan DNPI

Agus Purnomo, Staf Khusus Meneg LH, se usai pertemuan tersebut memberikan isyarat menarik. Pria yang memang banyak makan “asam garam” dunia lingkungan itu mengungkapkan akan dibentuknya Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Secarik lembaran keputusan tertanggal 4 Juli ada di tangannya. Kemudian, ia dengan hati-hati menyebutkan bahwa itu adalah draf tentang akan diresmikannya DNPI, yang akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kontan wartawan dari berbagai media massa memberikan tanggapan tentang keberadaan dewan baru tersebut, mulai dari isu keanggotaan, hingga fungsi dari DNPI yang terasa tak seimbang dan tak menumbuhkan kemandirian. Kemudian, se usai menghadiri lanjutan konferensi perubahan iklim di Bonn, Rachmat Witoelar memberikan penjelasan di rumah dinas. Menurutnya, DNPI dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim, dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian iklim. Salah satu programnya adalah kembali pada kegiatan inventarisasi dampak dan penyebab perubahan iklim di Indonesia.

Bahkan setelah tujuh bulan, kita masih berkuat pada rencana aktivitas awal, yakni menginventarisasi, yang selama ini belum jalan. Oleh karena kesal, Fitriani Ardiansyah dari World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menyatakan upaya menginventarisasi tak mudah.

WWF sendiri pernah melakukan program inventarisasi tentang kemungkinan dampak perubahan iklim di Lombok, yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan. “Namun, kalau tak djalankan, ya tak akan selesai-selesai,” paparnya sambil ngopi di sebuah kafe di Jakarta.

Se usai Lebaran, tepatnya pada 21 Oktober 2008, Rachmat Witoelar kembali menerima pers di Kantor DNPI yang berada di Gedung Garuda Jakarta, untuk membahas kemajuan beberapa kesepakatan internasional mengenai perubahan iklim. Satu hal yang muncul adalah masalah dana hibah dan utang dari perubahan iklim.

Agus Purnomo yang sering dipanggil Pungki, kemudian menjelaskan keputusan pemerintah mengenai hal ini. “Memang benar sebagian besar dana persiapan dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia berupa pinjaman, sebagian kecil dalam bentuk hibah. Pinjaman akan dialokasikan dalam bentuk proyek produktif seperti pembangkit listrik, atau investasi lain yang bersahabat,” paparnya.

Dalam diskusi tersebut juga terlontar kembali tentang makin rumitnya pendanaan perubahan iklim. Krisis global yang melanda, menurut Rachmat Witoelar, membuat negara-negara maju enggan kembali mengucurkan dana. “Untuk mengurus diri mereka sendiri saja sekarang sudah sulit, bagaimana mau menolong orang lain,” papar Rachmat.

Lalu ada kesedihan yang sejenak melintas, ketika terungkap program di dalam negeri mengenai perubahan iklim tak pernah intensif dilakukan. “Fund raising domestik belum dijajaki,” urai Rachmat. Oleh karena itu, diharapkan ada peran swasta dalam investasi yang bersahabat dengan perubahan iklim, seperti industri biofuel dan gedung-gedung yang bersahabat dengan lingkungan. Sementara itu, gerakan menanam pohon yang selama ini ada tak pernah pula direncanakan dalam program besar yang berkelanjutan. Meskipun dianggap gerakan voluntary masyarakat untuk menanam pohon yang ada saat ini, sudah pada tahap cukup menggembirakan.

Semua perjalanan tersebut pada akhirnya menyimpulkan ketidaksiapan pada rencana inventarisasi dan paradigma para negosiator pada tiap pertemuan internasional mengenai hal ini. Kalau kita memberikan perhatian pada isu tersebut, itu lantaran mengharapakan sumbangan pendanaan. Kata-kata manis dan sopan pada setiap pertemuan internasional berujung pada uang yang akan dikucurkan. DNPI dibuat berdasarkan harapan akan jumlah dana besar yang akan berputar. Dana yang akan kita terima, karena dianggap negara miskin dengan kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

Di antara semua paradoks tersebut, kata-kata mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore kembali terngiang ketika pertama kali mengungkapkan dasar utama pemikirannya mengenai perubahan iklim dalam film *Inconvenient Truth*. “Ini semua adalah masalah moral untuk menyelesaikannya,” ujar Al Gore.

Lalu, di mana moral kita sebagai insan yang memerhatikan sesama, sementara kita terus bergantung pada kesadaran pihak lain untuk memberikan dana? Dari dalam negeri, kita belum menumbuhkan kemandirian untuk menghadapinya dengan kemampuan yang kita sendiri miliki. (Sinar Harapan)

III. ARTIKEL

:

1. Ali Alat Lebur dalam Sejarah ASEAN (Oleh Gusti NC Aryani)

Awan gelap disertai gerimis menyelimuti Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ketika Kamis sore (11/12) pesawat Garuda Indonesia 869 rute Singapura-Jakarta mendarat membawa jenazah salah seorang putra terbaik yang pernah dimiliki Asia Tenggara.

Sore ini memang bukan pertama kalinya Jakarta diguyur hujan sehabian, namun suasana kelabu akibat mendung yang menggantung terasa lain dari biasanya karena disertai wajah-wajah sendu sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dipimpin Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda, yang sore itu khusus berada di ruang VIP terminal I-B guna menyambut jenazah Ali Alat.

Dilahirkan di Jakarta 76 tahun lalu, penerima anugerah Bintang Mahaputra Adipradana itu akhirnya menutup mata untuk selamanya di salah satu rumah sakit bergengsi di Singapura, saat 600an juta warga ASEAN hendak memulai aktivitasnya, pada pukul 07.30 waktu Singapura.

Selama puluhan tahun berkarir sebagai diplomat ulung, ayah tiga anak itu melawat ke Singapura dengan setumpuk agenda ASEAN di bahunya. Namun pada 24 Nopember 2008, dia terpaksa dirujuk ke Singapura setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta sejak 20 Nopember 2008.

Ali Alat tampak "lebih besar" dari Asia Tenggara atau ASEAN, sementara kiprahnya di kancah internasional adalah daftar panjang yang mungkin sulit ditandingi siapapun.

Ali Alat telah malang melintang dalam setiap komposisi tim diplomasi Indonesia untuk beragam acara --mulai PBB, OKI, APEC, OPEC, sampai GNB-- sejak 1960an hingga akhir hayatnya manakala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayainya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan salah seorang anggota delegasi "kelompok pakar" (EPG) Indonesia-Malaysia yang bertugas menghilangkan "kerikil" dalam hubungan baik kedua negara serumpun itu.

Berbicara ASEAN tanpa menyebut Ali Alat bagai sayur tanpa garam, sehingga berita meninggalnya diplomat senior Indonesia itu yang hanya empat hari menjelang pengesahan pemberlakuan Piagam ASEAN pada 15 Desember 2008, meninggalkan kisah sedih bagi ASEAN.

Suatu kisah yang sedikit ironis mengingat Ali tidak hanya tokoh kunci dibalik "reformasi" ASEAN dari organisasi yang berbasis elite menjadi organisasi berbasis rakyat, namun juga saksi sejarah panjang pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu.

Dalam perayaan hari ulang tahun ke-41 ASEAN 8 Agustus lalu, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan dengan penuh hormat memberikan potongan kue pertama kepada diplomat senior yang mantan wartawan itu, diiringi tepukan tangan dan tatapan kagum para diplomat muda Asia Tenggara yang memadati Gedung Kesenian Jakarta (GKJ).

Bukan hanya karena Alex --panggilan akrabnya-- menghabiskan dua tahun terakhir menggodok embrio dari Piagam ASEAN, suatu payung hukum yang telah dinantikan ASEAN selama 40 tahun namun juga karena romantisme masa lalu yang tak dapat diingkari para diplomat ASEAN.

Percaya atau tidak, Ali Alat yang malam itu empatpuluh tahun lalu mengenakan jas berwarna gelap didampingi istri tercinta, juga hadir dalam kesempatan sama --untuk mendampingi Menlu Adam Malik-- ketika lima menteri luar negeri ASEAN menandatangani perjanjian bersejarah yang kemudian mengikat negara-negara Asia Tenggara menjadi satu "keluarga besar" di Bangkok.

Puluhan diplomat muda dari 10 negara ASEAN yang saling bersulang merayakan ulang tahun ASEAN boleh jadi tidak pernah berpikir bahwa malam itu adalah ulang tahun terakhir ASEAN bersama "sesepuh" ASEAN itu.

Semua pihak tentu masih berharap akan terus dapat menikmati tidak hanya senyum Alex ketika bercanda dengan Hun Lakorn Le (wayang Thailand) yang menggodanya dalam pegelaran seni "Best of ASEAN Performing Arts II" itu, tapi juga nasihatnya untuk semua kemelut di kawasan Asia Tenggara.

Bahwa di masa mendatang ASEAN tidak bisa lagi bersandar pada ide-ide besar yang dimiliki pria kelahiran 4 November 1932 itu sudah tentu merupakan kehilangan besar bagi ASEAN mengingat ASEAN akan memasuki "hidup baru" dengan Piagam ASEAN.

Tapi bahwa sebelum berpulang Ali Alatas telah memberikan Piagam ASEAN sebagai "kado" terakhir yang menjadi pondasi baru bagi para penerusnya dalam menjaga keutuhan "keluarga besar," sudah pasti itu satu bukti komitmen besarnya untuk ASEAN.

Masih lekat di benak sejumlah orang yang berhubungan dekat dengannya bagaimana bersemangatnya Ali dalam perundingan-perundingan panjang menyusun embrio Piagam ASEAN di kawasan Ubud, Bali, sebagai salah satu anggota EPG Indonesia.

Ali Alatas diusianya yang ke 74 saat itu masih sangat sehat untuk memimpin para diplomat muda bernegosiasi mengenai cikal bakal aturan hukum yang akan mengikat 10 negara anggota ASEAN.

Tokoh yang dikenal ramah itu hampir tidak pernah terlihat lelah setiap kali keluar dari ruang perundingan.

"Ada apa lagi?"

Begitu selalu spanya, setiap kali menyaksikan puluhan wartawan baik lokal maupun asing menyerbunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkutat pada "akankah ASEAN memiliki suatu mekanisme HAM tersendiri".

Bukan rahasia lagi jika, perlindungan HAM adalah salah satu titik lemah ASEAN yang memberi citra tidak bagus bagi organisasi itu di kancah internasional.

Memburuknya kasus perlindungan HAM di Myanmar adalah salah satu sasaran empuk pihak barat untuk mempertanyakan eksistensi ASEAN.

Pada saat itu, sekalipun tidak secara terbuka menyatakan ASEAN akan memiliki suatu badan HAM, tapi Ali Alatas dengan optimis mengatakan ASEAN bukan jenis organisasi yang memomorduakan perlindungan HAM.

Dan sebuah senyum yang selalu menghiasi wajah Ali Alatas dalam setiap pertanyaan menyudutkan tentang memburuknya kondisi di Myanmar, seakan menjadi satu pertanda terwujudnya sesuatu yang awalnya dinilai sangat sulit dilakukan Asia Tenggara. Sesuatu hal itu bernama Badan HAM ASEAN. Suatu hal yang mencengangkan sejumlah pihak.

"Diplomasi itu seperti bermain kartu. Jangan tunjukkan semua kartu kepada orang lain. Dan jatuhkan kartu itu satu per satu."

Itu adalah sebaris kalimat bijak Ali Alatas yang mungkin menjadi rahasia di balik setiap optimismenya dalam menghadapi nada-nada pesimistis pada perjuangan diplomasi.

Mantan Menlu Indonesia periode 1988-1999 itu sesungguhnya bukan satu-satunya orang yang disebut "tokoh ulung" ASEAN dalam kelompok yang menamakan dirinya sebagai EPG ASEAN untuk menyusun rekomendasi Piagam ASEAN, namun tanpa mengecilkan kontribusi para tokoh ulung yang lain, pendapat seorang Ali Alatas mengenai satu batu sandungan penting bagi ASEAN sudah tentu perlu untuk didengar.

Optimisme Ali Alatas pada masa depan ASEAN dengan pengesahan Piagam ASEAN bahkan masih terungkap pada Juli 2008 lalu saat ia menghadiri diskusi pakar bertema "The Road to Ratification and Implementation of the ASEAN Charter: Its Strengths and Weaknesses", yang diselenggarakan The Habibie Center dan ASEAN Studies Center, Institut Studi Asia Tenggara (ISEAS).

"Kekurangan dalam Piagam ASEAN bisa sambil jalan diperbaiki," katanya tanpa mampu menyembunyikan binar optimisme dibalik lensa kacamatanya.

Pada 15 Desember 2008, sepuluh Menlu ASEAN --Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar-- akan berkumpul di Sekretariat ASEAN Jakarta untuk mensahkan pemberlakuan piagam yang semula diragukan akan betul-betul dapat disahkan sesuai rencana penghujung 2008 mengingat hingga medio November tiga negara kunci --Filipina, Indonesia dan Thailand-- masih juga belum mendepositkan instrumen ratifikasi kepada Sesjen ASEAN dan memburuknya krisis politik di Thailand --ketua ASEAN periode 2008-2009-- yang berakibat pada tertundanya penyelenggaraan pertemuan puncak ke-14 ASEAN di Chiang Mai.

Suatu peristiwa bersejarah bagi ASEAN yang sayangnya harus dilewatkan oleh seorang Ali Alatas, yang telah mencurahkan masa-masa terbaiknya demi kelangsungan keluarga besar ASEAN.

Dan dengan segala tantangan yang menghadang --diantaranya krisis politik Thailand, macetnya peta jalan demokrasi Myanmar, sengketa Preh Vihear Thailand-Kamboja-- di bawah bayang-bayang ancaman krisis keuangan global, ASEAN harus menyongsong masa depan tanpa pernah lagi dapat mendengar pendapat dari salah seorang "tokoh ulung"-nya.

Empat puluh satu tahun Ali Alatas menjadi pelaku sekaligus saksi sejarah perjalanan panjang dan jatuh bangun ASEAN. Kini, tiba saatnya "singa tua" itu beristirahat untuk kemudian menjadi bagian dari catatan sejarah ASEAN itu sendiri sebagaimana pendahulunya yang tak kalah besar, Adam Malik. (ANTARA)

2. War on drugs in RI: Demonizing the most vulnerable (by Martin Lundqvist and Ricky Gunawan)

When arriving at the international terminal of Soekarno-Hatta Airport, Jakarta, the first tangible impression is the huge neon sign reading "Welcome to Indonesia -- Death Penalty for Drug Traffickers!" This sign is indicative of the Indonesian government's policy on drugs, which has resulted in the adoption of a "war on drugs" law, as well as in stigmatizing and discriminating against the domestic drug user community.

According to Law No. 22/1997 on Narcotics anyone handling narcotics is a criminal. This means that the drug dealer, the drug trafficker and the drug user are liable for criminal prosecution. There is no doubt that the drug trafficker should be prosecuted and punished, but the drug user? The government claims to have adopted a "war on drugs" -- a war which has resulted in criminalizing and stigmatizing some of the most vulnerable people in society -- the drug addicts.

This law has been accompanied by several government-initiated advertising campaigns, the basic tenet of which is to portray the drug addict as the antithesis of "goodness". S/he is portrayed as a sinful person who will end up in hell, contrasting with the "good citizen" who will go to heaven in the afterlife. The drug user is additionally depicted as inhuman and is virtually demonized in these campaigns.

As a natural consequence of this law and the advertisement campaigns, discrimination against drug users is a common feature in Indonesian public life -- most notably seen in the relationship between the police and the drug user. It seems many police have a quota of arrests to meet every month -- arrests which are disproportionately aimed at drug users.

Additionally, they are often arrested and then asked for money in order to be released. Given that the average salary for the police is only around Rp 3 million (US\$241.35) per month, this is an easy way to increase their income. In their interactions with drug users the police often use torture, threats and illegal detention as a means to gain confessions of alleged crimes or for payment of bribes.

Torture practices are especially experienced by female drug users. They are frequently subjected to sexual harassment from the police. It is common knowledge amongst the women that in order for them to be released they must provide sexual services to the police. In their daily language this is referred to as: *tukar body* (exchange body). In practice then, their options are restricted to paying money, providing sex services, or staying detained.

The drug user is an ideal victim for abuse of power, since very few of them are likely to file complaints about police misconduct. This is partially so because many of them have internalized the values of the "war on drugs" campaigns, and feel they somehow deserve to be tortured.

They also have a widespread fear of the police -- a fear which is highly rational given the normal (violent) pattern of interactions between the police and the drug user. Therefore, the police enjoy almost full impunity when it comes to violating the human rights of drug users.

Sadly, very few legal aid and human rights organizations advocate against torture when the victim is a drug user. They are worried that this might negatively affect their "good image" as human rights defenders. This is regrettable, but also quite understandable, when considering the perception most Indonesians have of drug users, which is condemning, to say the least. However, defending human rights should be about defending every human being's rights -- regardless of their sex, race, gender, religion or social status.

As mentioned, large sectors of the Indonesian public hold strongly disapproving attitudes toward the drug user, attitudes which (to a large extent) derive from the government's demonizing campaigns. Drug users are considered to be sinful and should therefore be excluded from the environment of the "good citizens" -- including education and health institutions. The consequence of this is that many schools have a strict admissions policy where prospective students have to pass a urine test in order to prove that they are "clean".

When it comes to healthcare, drug users are often treated in a demeaning manner by doctors and health care personnel. For example, they are frequently asked questions such as: "why do

you want to get sick? You know drugs make you sick, still you use it". The drug user has to endure moral condemnation which should have no place in a professional medical institution.

Finally, it is important to note that drug addiction is indeed a major societal problem which needs to be combated. However, this need not include criminalizing and stigmatizing a large group of citizens. Many international examples show that it is possible to be "hard on drugs" while also respecting the needs and human rights of its citizens.

Heavy drug addiction is a health hazard, and the addict should be given proper medical care to help combat his addiction, rather than to be prosecuted and put in jail. Pursuant to Indonesian Law No. 11/2005, the government must recognize the right of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, and thus must maximize available resources to achieve full realization of this right.

This law is derived from the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which Indonesia has signed and ratified. Indonesian Law No. 22/1997 unfortunately proves that the government is more concerned with its "war on drugs" than with the health and human rights of some of its most exposed citizens. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Bukan Soal Menang Kalah

Forum Demokrasi di Bali harus dijadikan sebagai jembatan penyamaan persepsi mengenai demokrasi dari setiap negara, bukan ajang saling dikte.

Ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Forum Demokrasi di Bali yang dihadiri wakil dari 32 negara hari Rabu lalu itu sangat menarik.

Demokrasi seperti apakah yang cocok untuk Indonesia? Yang cocok untuk Indonesia belum tentu cocok bagi negara lain, seperti Malaysia atau Australia.

Bung Hatta pernah mengatakan, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan, itulah yang cocok bagi masyarakat Indonesia yang biasa bermusyawarah untuk mufakat.

Bagi negara-negara Barat, misalnya mengutip pendapat Fareed Zakaria, demokrasi berarti "demokrasi liberal": sebuah sistem politik yang ditandai tidak hanya oleh pemilu yang bebas dan fair, tetapi juga oleh penegakan hukum, sebuah pemisahan kekuasaan, dan perlindungan atas kebebasan-kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan berkepemilikan.

Walau ada perbedaan, tentu ada prinsip-prinsip dasarnya yang sama, karena pada hakikatnya demokrasi adalah menghormati adanya perbedaan. Bukankah demokrasi adalah suatu kondisi masyarakat yang diresapi oleh karakter penghormatan pada semua anggota masyarakat—termasuk antarnegara—dalam perbedaan.

Dari sinilah, menurut hemat kita, pernyataan Presiden di Bali itu juga berlaku bagi kita yang sangat beranekaragam ini, baik suku, agama, adat, budaya, maupun orientasi serta afiliasi politik. Kadang kita berbicara demokrasi dengan begitu fasih dan enteng, tetapi dalam praktiknya tidaklah demikian. Kita terkadang menutup mata terhadap adanya perbedaan-perbedaan itu atau tidak ikhlas menerima perbedaan-perbedaan itu.

Padaahal, demokrasi mestinya bukan soal kemenangan kelompok atau golongan, tetapi kesejahteraan bangsa. Syaratnya, kesatuan dan persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan. Keindonesiaan yang majemuk, bertahan bukan karena tirani mayoritas atau minoritas, tetapi karena kebersamaan dan saling pengertian.

Kemajemukan adalah warisan bangsa yang harus dipertahankan karena sebenarnya merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Dengan fondasi berbangsa yang kokoh, semua komponen bangsa terlibat membangun negeri dalam semangat gotong-royong.

Hakikatnya, demokrasi terarah pada perdamaian. Demokrasi yang bermuatan kekerasan akan melunturkan makna kehidupan bersama sesuai dengan aspirasi rakyat. Akhirnya kita berharap dari Bali akan lahir wajah demokrasi Indonesia yang baru, yang bercitra damai. (Kompas)

2. A statesman extraordinaire

Indonesia lost a great man Thursday with the news of the passing away of former foreign minister Ali Alatas. More than a diplomat -- a profession that he engaged in for most of his career life -- Alatas was a true statesman in every sense of the word.

We have all the more reason to mourn his death because statesmanship is a rare quality found among Indonesia's leadership today.

Alatas, ever loyal to whomever he served, managed to come away with his integrity largely in tact even when his bosses became tainted and condemned by corruption and other scandals.

Alatas served as foreign minister under president Soeharto in 1988-1998 and under president B.J. Habibie in 1998-1999. He continued to act as foreign policy advisor to successive presidents -- Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri and now Susilo Bambang Yudhoyono.

He was never a politician, but he served his country and his nation so well, more so than many of his peers during his lifetime.

He was indispensable.

Indonesia has a lot to thank him for, as he managed to maintain the nation's standing and integrity in the international community when the country was beset with problems at home that could have sullied its image, from rampant corruption, widespread human rights abuses and environmental problems that troubled our neighbors to gross mismanagement of the country.

His biggest contributions as Indonesia's chief diplomat included helping to negotiate peace in Cambodia and to a lesser extent, the southern Philippines.

He was also the main driver in the development and expansion of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the 1990s, which would become one of the most successful regional organizations in the world.

He somewhat defied the notion that Indonesia's foreign policy could not be completely detached from domestic issues and challenges.

Even as trouble continually beset his home country, his leadership, personality, character, negotiating skills and articulation helped to bring international accolades for Indonesia.

He faced his biggest test as foreign minister in handling Indonesia's occupation of East Timor, an issue he fondly described as "a pebble in the shoe" -- a continuous irritation in Indonesia's diplomacy.

Events at home twice botched his diplomatic efforts to resolve the issue in the international arena.

The first was the massacre of East Timorese mourners in Dili, capital of East Timor, by the Indonesian Military, in 1991, which happened just as Indonesia was about to reach an agreement with Portugal and the UN resolving the issue.

The second time came in 1999 when President Habibie put on the table an option of a referendum for East Timorese while Alatas and his Portuguese counterpart were putting on the final touches of a widespread autonomy arrangement for East Timor under Indonesia's rule.

On both occasions, he felt betrayed by his own bosses, but he never let his feelings get in his way and each time he resumed his work and made the best out of a bad situation.

Alatas also helped to negotiate the often troubled relations Indonesia had with its southern neighbor Australia as well as with other neighbors in Southeast Asia.

Not surprisingly, because of his reputation in the world of diplomacy, Alatas' name came up among favorite candidates being considered for the UN Secretary-General position in 1997. Alas, fate would have it differently.

Ever a true diplomat, Alatas continued to attend national day receptions hosted by foreign embassies in Jakarta even in his old age. He could be humorous at these receptions, but he still chose his words carefully and never spoke ill of his former bosses when others easily condemned them.

He was a statesman extraordinaire. Indonesia will miss him dearly. Farewell Pak Alex. (The Jakarta Post)

**Jakarta, 12 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media**

Deplu